

FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI TERNAK DALAM MASA REFORMASI

Lilis Nurlina, Marina Sulistyati dan Wiwin Tanwiriah
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Bandung 40600

ABSTRAK

Penelitian mengenai Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi ini dilakukan di Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon petani-peternak sapi perah terhadap setiap program pembangunan yang diintrogasikan ke pedesaan dalam masa reformasi, peran aparat (pelaksana program), serta faktor-faktor yang berpengaruh (pendorong dan penghambat) terhadap pemberdayaan masyarakat tani-ternak di pedesaan pada masa reformasi. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah petani-peternak sapi perah anggota KUD Cisarupan sebanyak 25 orang, ditambah 5 orang informan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Data sekunder diambil dari Kantor Desa Cidatar, KUD Cisarupan dan Laporan PPL-KCD Peternakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan petani holtikultura dan peternak sapi perah, untuk faktor pendukungnya berupa suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tersebut (daerah dingin: 13⁰C-22⁰C), adanya KUD yang menyalurkan sarana produksi pertanian-peternakan serta menerima hasil produksinya terutama susu dan pengalaman bertani-beternak yang cukup lama (3-20 tahun). Faktor penghambat berasal dari faktor fisik/struktur pemilikan lahan yang sempit, rata-rata kurang dari 0,5 ha, faktor ekonomi dan institusional berupa kebijakan harga yang tidak berfihak kepada mereka baik dari pemerintah maupun harga susu dari KUD yang lebih rendah, Rp. 100/liter dibanding KUD lain yang terdekat dengan KUD Cisarupan dengan kualitas yang sama, serta faktor sosial/kultural berupa sikap dan mentalitas petani-peternak yang lebih berorientasi pada masa kini serta pengurus KUD yang belum melakukan transparansi penuh dalam penentuan kebijakannya.

Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat tani ternak, faktor fisik, kultural dan institusional.

THE FACTOR THAT INFLUNCED TO THE DAIRY FARMER'S ECONOMIC CAPABILITY IN REFORMATION PERIOD

ABSTRACT

A research on The Factor that Influenced to the Farmer-Dairy Farmers Ekonomik Capability was conducted at Cidatar Village, Cisurupan Sub-District, Garut District. The aim of this research is to know the response of dairy farmers on every village development program, the role of exhibitor program/KUD'S leader, and to know the factors that influenced to the dairy farmer's economic capability (push factor and constrain factor) at village in reformation period. This research is a case studies that stressing on qualitative method. The subjects of this research are vegetable farmer and dairy who are KUD members in Cisurupan's, containing 25 person plus 5 informants. The primary data were collected by depth interview and groupdiscussion method. The data were analysed by interactive analysis method. The secondary data were brought from Cidatar Vilage Office, Cisurupan Sub-District Office, and Document of PPL-KCD Animal Husbandry. From this research it can be concluded that the push factor is: suitable to temperature environment for their livelihood (13°C - 22°C), there is KUD which supplies agricultural and animal husbandry facility production and receive their production, and also long experience in their business (3-20 year). The constrain facors came from physical factor, economic factor institutional factor like there is not standard price from the government and the milk price from KUD which lower than Rp.100,- per litre compared to other KUD that nearest to KUD Cisurupan in the same quality; and social/cultural factor like farmers attitde and mentality which today is more oriented and also KUD leader who are not transparentyet in their authority.

Keywords : Economic capability of dairy farmers, the fysical, cultural and structural, institutional, constraints.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi telah memporakporandakan perekonomian negara kita. Hal ini dangat dirasakan oleh masyarakat miskin di pedesaan yang umumnya mereka adalah petani-peternak kecil dan buruh tani. Berbagai program sektoral yang dilaksanakan melalui berbagai departemen dan program nasional dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang telah dilaksanakan, seolah diseret oleh badai krisis ekonomi sehingga jumlah keluarga di Indonesia semakin bertambah disbanding sebelum krisis.

Dari pengalaman berbagai program pembangunan yang masuk ke pedesaan, faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu program adalah kelompok sasaran (petani-peternak), dalam hal ini mereka harus menjadi pemeran utama

Faktor-faktor yang Berpengaruh Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi (Lilis Nurlina dkk.)

dalam pembangunan pertanian-peternakan. Kalau pemerintah (dinas/instansi terkait) mau jujur, seharusnya dapat menilai sudah seberapa jauhkah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tani-ternak. Menurut Frances Korten (1981) dalam Amri Marzali (1991), kebijakan pembangunan dengan pendekatan terpusat memiliki banyak kelemahan seperti keterlibatan dalam pencapaian, membawa fasilitas-fasilitas baru tanpa cukup biaya dan tenaga untuk menjalankan dan menjaganya, bantuan bersifat seragam tanpa menghiraukan kebutuhan khas masing-masing desa, serta telah menimbulkan ketergantungan, dimana penduduk desa menganggap pemerintah sebagai badan amal semata. Sementara dari penduduk sendiri menghadapi kendala : pendidikan yang rendah, orang desa masih hidup dalam alam tradisional, ada kecenderungan salah urus di tingkat aparat desa; dan fasilitas yang minimum.

Dalam masa Reformasi, dimana pemerintah berupaya untuk lebih berpihak kepada masyarakat bawah melalui Program Jaringan Sosial (JPS) dengan saluran birokrasi diusahakan tidak berbelit-belit. Diharapkan program yang telah berjalan seperti program kinerja KUD serta program yang masuk ke pedesaan ada perbaikan yakni lebih transparan dan tepat sasaran. Untuk itu penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat tani-ternak sapi perah dalam masa Reformasi ini, difokuskan di Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, mengingat desa ini merupakan salah satu sentral produksi pertanian hortikultura yang cukup banyak mendapat kucuran dana Kredit Usaha Tani (KUT) serta adanya KUD Cisarupan yang menyalurkan sarana produksi pertanian peternakan dan menerima hasil susu peternak. Sejauh mana keefektifan dana KUT dan kinerja KUD dalam meningkatkan kesejahteraan petani-peternak di masa Reformasi ini merupakan hal yang sangat perlu untuk diteliti.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana respon petani-peternak terhadap setiap program pemerintah yang diintroduksikan ke pedesaan terutama dalam masa reformasi yang diharapkan berbeda dengan masa orde baru; (2) Bagaimana peran pelaksana program (PPL, pengurus KUD, pendamping) dalam memfasilitasi program, dan diharapkan berbeda dengan masa Orde Baru; (3) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh (pendorong dan penghambat) terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tani ternak dalam reformasi ini.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat mendorong dan menghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tani ternak dalam masa Reformasi.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat

Menurut perencana dan pengamat pembangunan, pembangunan desa dinyatakan sebagai suatu proses perubahan dalam masyarakat desa, di mana kemiskinan akan dihapuskan dan kreativitas, partisipasi dan tingkat pengetahuan yang dimiliki akan digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun lingkungan termasuk sumber daya dari luar desa, secara lebih produktif sesuai dengan kebutuhan, fasilitas jasa dan barang yang benar-benar dibutuhkan kaum miskin (BO Bengston, 1979 yang disitir Siti Sugiyah, 1991).

Pembangunan masyarakat, menurut definisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diartikan sebagai suatu proses yang meliputi dua elemen. Pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Kedua, bantuan dan pelayanan teknis dari pemerintah yang bertujuan untuk membangkitkan prakarsa tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain.

Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak Melalui Pendekatan Kultural, Struktural dan Institusional

Berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan. Determinan sosial budayanya seperti posisi, status, dan wawasan yang dimilikinya. Sebaliknya, semua fasilitas sosial budaya yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan kebudayaan kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat yang tidak selamanya ramah, bahkan antagonistik kepadanya. Hal ini merupakan "lingkaran setan", dimana orang-orang miskin yang tak berdaya acapkali terjebak di dalamnya, dan karena itu sulit melepaskan diri dari nasib buruknya itu. Dari situ lahirlah sinyalemen yang menyatakan bahwa "kemiskinan" itu menghasilkan kemiskinan (Wignyosubroto, 1995).

Untuk meningkatkan keberdayaan petani-peternak ini, menurut Wignyosubroto (1995) diperlukan suatu upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka dapat melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu dan melek lainnya sebagai suatu keberdayaan kultural. Sementara pemberdayaan secara struktural menurut Bagong Suyanto (1995), dapat ditempuh melalui: (1) Memperkuat posisi tawar dan memperkecil ketergantungan masyarakat miskin terhadap kelas sosial di atasnya dengan cara memperbesar kemungkinan mereka melakukan diversifikasi usaha; (2) Memberikan bantuan modal kepada masyarakat miskin dengan bunga yang rendah dan berkelanjutan; (3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat ikut terlibat menikmati hasil keuntungan dari produknya dengan cara menetapkan harga yang adil baik untuk input maupun output; (4) Mengembangkan kemampuan

Faktor-faktor yang Berpengaruh Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi (Lilis Nurlina dkk.)

masyarakat miskin agar memiliki keterampilan dan keahlian untuk memberi nilai tambah pada produk hasil usahanya. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara institusional, menurut Sri Edi Swasono (1995) dapat ditempuh dengan cara memanfaatkan koperasi melalui : (1) Pendekatan partisipatory dan emansipatory dimana petani-peternak tidak menjadi objek dari program pengentasan kemiskinan itu sendiri tetapi harus diberi peran yang lebih besar melalui hubungan ekonomi yang bersifat kemitraan yang sejajar; (2) Koperasi harus menjadi model pembangunan alternatif yang dapat mewujudkan pembangunan berdasarkan swadaya masyarakat bawah; dan (3) Koperasi harus memiliki kemampuan menghimpun ekonomi rakyat yang tercerai berai, sehingga koperasi menjadi wadah formal bagi sektor informal, dan berfungsi sebagai "agent of development" bagi sektor ekonomi rakyat yang berdasarkan pada mekanisme informal-tradisional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tuntas (Virenden Bergt, 1979). Subjek dalam penelitian ini adalah petani hortikultura dan peternak sapi perah anggota KUD Cisirupan yang berjumlah 25 orang ditambah 5 orang informan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan diskusi kelompok. Data sekunder diperoleh dari kantor Desa Cidatar, Kantor Kecamatan Cisirupan dan KUD Cisirupan serta dari Laporan Pendamping (PPL dan KCD Peternakan).

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Respon petani peternak terhadap program yang masuk ke pedesaan dalam masa Reformasi, yang dikaji dari sikap dan mentalitas, tanggung jawab kejujuran serta kebersamaan dalam menyukseskan program yang dimanifestasikan dalam hal eksistensi mereka pada saat Rapat Anggota Tahunan KUD, tingkat adopsi inovasi dari program KUD dan pengembalian kredit.
- (2). Peran aparat dan pelaksana program, dikaitkan dengan peran dan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk teknis program serta pandangan masyarakat tani-ternak dan pemuka masyarakat.
- (3). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat tani-ternak, dikaji dari aspek mentalitas petani-peternak dan aparat (aspek kultural), kebijakan harga input-output pertanian (pupuk, pestisida dan hortikultura), kebijakan harga input-output peternakan (konsentrat dan susu), struktur pemilikan lahan dan tingkat pemilikan ternak (aspek struktural) serta aspek institusional berupa peran KUD dalam upaya menjalin kerjasama yang

partisipatif dengan petani peternak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-interpretatif. Model analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif, dimana dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Keempat proses ini tidak berlangsung secara linier, tetapi merupakan siklus yang interaktif (Faisal, 1992).

Pada teknik ini setiap catatan yang dihasilkan dalam pengumpulan data, apakah hasil wawancara mendalam secara perorangan terhadap informan dan beberapa responden maupun hasil diskusi kelompok, perlu direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti duduk permasalahannya. Selanjutnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara tertentu dari hasil pemahanan dan pengertiannya. Kesimpulan sementara tersebut selanjutnya didiskusikan dengan responden lain dan informan. Mereka diminta menyebutkan interpretasinya baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan kesimpulan sementara peneliti. Ketika mereka tidak lagi menyebutkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kesimpulan sementara peneliti, maka kesimpulan sementara peneliti menjadi kesimpulan tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Petani-Peternak Sapi Perah terhadap Program Pembangunan Pedesaan dalam Masa Reformasi

Dalam hal ini respon diartikan sebagai tanggapan seseorang berupa sikap dan perbuatan karena ada rangsangan dari luar. Masyarakat tani ternak pada umumnya mengartikan masa Reformasi sebagai masa yang penuh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, protes (19 orang atau 74%), bahkan demonstrasi bagi sebagian masyarakat yang mudah disulut dan dihasut pihak lain yang kurang bertanggung jawab (9 orang atau 26 persen). Hal ini merupakan akses/dampak negatif dari Reformasi, sementara aspek positifnya adalah sikapnya yang lebih kritis dan lebih menuntut keterbukaan dari pihak atasnya. Sikap mereka yang demikian tidak terlepas dari pengaruh luar seperti adanya sistem komunikasi terbuka dimana melalui media elektronik mereka dapat menyaksikan berbagai demonstrasi dari masyarakat bawah yang menuntut keadilan penguasa dan konglomerat Orde Baru.

Dengan adanya program rutin berupa kinerja KUD Cisarupan serta 3 program yang masuk ke pedesaan dalam masa Reformasi (Kredit Usaha Tani, Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal dan Operasi Pasar Khusus), maka respon petani hortikultura dan peternak sapi perah dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Berpengaruh Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi (Lilis Nurlina dkk.)

Posisi peternak sapi perah sebagai anggota KUD Cisurupan masih lemah dalam turut serta menentukan kebijakan KUD. Dalam masa Reformasi ini perjuangan peternak untuk mendapatkan haknya lebih gigih dibanding pada masa Orde Baru. Hal ini nampak dari munculnya tuntutan kenaikan harga susu yang lebih rendah Rp. 100/liter dibanding KUD lain, keberanian untuk menuntut pelayanan kesehatan dan inseminasi buatan yang biasanya datang terlambat yang dapat merugikan peternak, keberanian mereka dalam menjual susu ke KUD lain, dan membeli konsentrat dari luar atau meracik sendiri. Semua ini tidak mereka lakukan pada masa Orde Baru.

Tanggapan dari KUD terhadap tuntutan tersebut masih bersifat "transparansi selektif", yakni adanya peningkatan pelayanan kesehatan hewan, ada sedikit kenaikan harga susu akan tetapi ada pengklasifikasian harga berdasarkan grade kadar lemak dan berat jenis susu.

Grade A dengan kadar lemak lebih dari 3,3, berat jenis (BJ) 1,24, diterima dengan harga Rp. 1.000,00/liter. Grade B: Kadar lemak 3,1-3,4. BJ 1,03-1,23, harganya Rp. 950,00/liter, dan Grade C: Kadar Lemak 3,0 BJ 1,02, harganya Rp. 810,00/liter. Sementara di KUD Bayongbong dan KUD Cikajang harganya lebih tinggi Rp. 100,00/liter untuk setiap gradenya. Hal ini justru membuat para peternak merasa tidak puas terhadap harga tersebut dan apabila ada perbedaan test/uji kadar lemak dan BJ di kandang dan di tempat penampungan.

Upaya lain yang dilakukan KUD Cisurupan untuk pengembangan sapi perah dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintah Jepang melalui Japan International Committee (JIC) dalam hal percobaan dan percontohan Embryo Transfer pada 4 kelompok peternak sapi perah; percobaan silase dari daun dan batang jagung; serta kerja sama dengan pihak Perhutani untuk menanggulangi kelangkaan hijauan pada musim kemarau. Namun pembuatan silase ini masih belum dilaksanakan peternak dengan alasan kesulitan untuk membuat tempat silase tersebut (silo). Demikian pula dengan penanaman rumput di lahan Perhutani tidak bisa dilaksanakan karena berebut dengan petani hortikultura, sehingga kelangkaan hijauan tetap menjadi kendala usaha ternak ini.

Respon petani hortikultura terhadap KUT bervariasi, ada yang sangat hati-hati karena merupakan hutang yang harus dibayar meskipun usahanya nanti gagal, seperti yang dilakukan oleh kelompok petani yang sudah ada dan berada di bawah naungan KUD akan tetapi ada pula yang sangat responsif untuk mendapatkan pinjaman terutama yang melalui LSM yang berpusat di Bandung. Persyaratan yang diajukan KUD lebih berat dan lebih tertib administrasi, sehingga pengembaliannya pun lebih besar yang melalui KUD (45% dari 152 juta) dibanding yang melalui LSM (30% dari 148 juta).

Kegagalan pengembalian terutama disebabkan karena adanya panen raya dari komoditas yang diusahakan (cabe, kentang, jagung) karena para petani di desa-desa banyak yang memanfaatkan KUT untuk menanam komoditas tersebut. Di samping itu ada sebagian petani yang beritikad kurang baik yakni

menyalahgunakan kredit untuk kepentingan lain bahkan ada beberapa yang kabur.

Dari aspek kemanfaatannya, adanya KUT ini justru dirasakan oleh petani yang mengalihkan pemanfaatannya dari tani hortikultura ke sapi perah, dan yang dinilai gagal adalah usaha tani cabe dan kentang, sementara jagung agak berhasil. Kegagalan ini disebabkan oleh ketidakpastian harga hasil produksi.

Respon masyarakat tani ternak terhadap program P3DT (Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal) dengan anggaran sebesar 50 juta yang dibagi 3 termin, berupa pelebaran dan perbaikan jalan desa menjadi jalan terpor (yang diberi batu dan distum/dihaluskan) sepanjang 2,05 km untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi pertanian dan peternakan beserta hasil produksinya cukup baik. Proyek ini mengambil sebagian tanah masyarakat, dan diantaranya ada yang menuntut ganti rugi dan ada yang diberi dan ada yang tidak (bersifat tertutup), mengingat dana yang tersedia tidak memadai. Pelaksanaan perbaikan jalan ini dimulai pada bulan Agustus 2000 selama 120 hari. Respon masyarakat terhadap program OPK (Operasi Pasar Khusus) atau penyediaan beras murah yang sedianya untuk masyarakat pra sejahtera, pada kenyataannya dibagi rata dengan masyarakat yang lebih mampu lainnya. Jatah desa ini sebesar 2,8 ton per bulan dibagi untuk 50 RT, sehingga pelaksanaannya digilir setiap RT mendapat beras 2 bulan sekali dengan jatah sekitar 3 kg per kepala keluarga.

Peran Aparat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan

Peran aparat desa, kecamatan, pengurus KUD, dalam masa Reformasi ini dituntut lebih terbuka, lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dibanding pada masa Orde Baru. Pengurus KUD dalam hal ini ketua KUD yang merangkap Ketua LKMD belum sepenuhnya terbuka dalam menentukan kebijakannya, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota dan karyawannya. Sementara sikap aparat lainnya seperti Kepala Desa, KCD Peternakan dan PPL sudah lebih terbuka dan mengakui berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap program, sehingga dinilai ada perbaikan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tani-ternak.

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Tani-Ternak Sapi Perah dalam Masa Reformasi

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat tani-ternak sapi perah terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya antara lain berupa kondisi fisik yakni tanah yang subur, suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tani hortikultura dan usaha ternak sapi perah (13-22°C), adanya KUD yang menyalurkan sarana produksi pertanian, peternakan, dan menampung hasil susunya, serta cukup lamanya pengalaman bertani dan beternak (3-20 tahun). Sementara faktor penghambatnya berasal dari faktor

Faktor-faktor yang Berpengaruh Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi (Lilis Nurlina dkk.)

kultural berupa sikap dan mentalitas peternak sapi perah yang lebih berorientasi pada masa kini (belum melaksanakan pembuatan silase dari daun dan batang jagung atau dari persediaan rumput pada musim hujan untuk mengantisipasi kekurangan hijauan pada musim kemarau). Demikian pula dengan sikap petani hortikultura yang kurang hati-hati dalam pemanfaatan KUT sehingga tunggakannya cukup besar. Dari faktor struktural/kebijakan ekonomi yakni tidak adanya kebijakan harga hortikultura dari pemerintah karena diserahkan pada pasar, sehingga harga hasil produksi sulit diantisipasi. Kendala dari aspek institusional berupa belum berperannya lembaga koperasi/KUD dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya (harga susu lebih rendah dibanding KUD lain sementara kualitas konsentrat kurang baik). Di samping itu kondisi peternakan yang ada di tengah-tengah pemukiman penduduk cukup mengganggu kesehatan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Respon petani hortikultura dan peternak sapi perah terhadap setiap program pembangunan pedesaan pada masa Reformasi ini ada yang positif yakni cukup kritis dan menghendaki adanya keterbukaan dari kebijakan KUD (16 orang atau 74%), akan tetapi ada pula respon yang negatif berupa lebih banyak menuntut hak dibanding kewajiban, serta mudah dihasut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (9 orang atau 26%).
2. Peran aparat pelaksana program pembangunan di pedesaan dalam masa Reformasi ini sudah lebih terbuka, lebih hati-hati dan menanggapi aspirasi petani-peternak, hanya saja dari pihak pengurus KUD masih bersifat transparansi selektif
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan petani hortikultura dan peternak sapi perah : Faktor pendorong dari aspek fisik berupa tanah yang subur, suhu lingkungan yang cocok untuk usaha tersebut (13-22^oC), pengalaman dan kemampuan bertani dan beternak sudah memadai, dan adanya KUD yang menyalurkan sarana produksi pertanian-peternakan. Faktor penghambatnya antara lain : faktor fisik/struktur pemilikan lahan yang sempit (rata-rata kurang dari 0,5 ha) baik untuk usaha tani maupun usaha ternak yang berakibat pada rendahnya skala pemilikan ternak (rata-rata 3,64 satuan ternak); serta limbah kotoran ternak yang mengganggu kesehatan lingkungan; faktor cultural/sosialnya berupa sikap dan mentalitas petani hortikultura dan peternak sapi perah yang lebih berorientasi pada masa kini, kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin yang nampak dari besarnya tunggakan KUT (55% dari 152 juta yang melalui KUD dan 70% dari 148 juta yang melalui LSM), terjadinya penyerobotan lahan Perhutani yang sedianya untuk penanaman rumput oleh petani hortikultura, serta tidak

dilaksanakannya pembuatan silase dalam rangka mengantisipasi kekurangan hijauan pada musim kemarau. Dari sikap pengurus KUD belum sepenuhnya aspiratif terhadap tuntutan anggotanya. Kendala dari faktor ekonomi/struktural/kebijakan dari atas berupa tidak adanya ketidakpastian harga (sangat pluktuatif) sehingga sulit diantisipasi yang berakibat merugikan petani hortikultura, demikian pula dengan harga susu yang ditetapkan KUD Cisurupan yang lebih rendah Rp. 100/liternya dibanding KUD lain yang terdekat.

Saran

- (1). Sebaiknya pihak Pengurus KUD menaikkan harga susu minimal sama dengan KUD lain dan meningkatkan kualitas konsentrat meskipun harganya agak dinaikkan.
- (2). Bagi petani dan peternak sapi perah sebaiknya mencoba pembuatan silase dari daun dan batang jagung atau dari rumput yang banyak pada musim hujan untuk mengantisipasi kekurangan pada musim kemarau.
- (3). Bagi pemerintah sebaiknya ada penetapan harga sayuran di atas harga titik impasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Marzali. 1995. Patisipasi Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Nasional. Kertas Kerja Pada Diskusi Panel "Soedjatmoko Annual Memorial; di Padang.
- Bagong Suyanto. 1995. Perangkap Kemiskinan, Problema dan Strategi Pengentasannya. Airlangga University Press. Surabaya.
- Faisal, S. 1992. Format-format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Cetakan Kedua. Rajawali Press. Jakarta.
- Koenjaraningrat. 1993. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Rogers, Everet, M., 1969. *Modernization Among Peasant: The impact of Communication*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Siti Sugiyah, M., 1991. Kepemimpinan Wanita dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Dua Desa di Kecamatan Purwa Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Seri Thesis Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Soeharja, A. dan Patong. 1973. Sendi-sendi Usaha Tani. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
- Sri Edi Swasono. 1995. Pemberdayaan Masyarakat Bawah Melalui Institusi Koperasi dalam Bagong Suyanto, 1995, Perangkap Kemiskinan. Problema dan Strategi Pengentasannya. Airlangga University Press. Surabaya.

Faktor-faktor yang Berpengaruh Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi (Lilis Nurlina dkk.)

Vredenberg, J., 1979. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Cetakan Kedua. Penerbit Gramedia. Jakarta.

Wignyosoebroto, 1995. Pemberdayaan Sebagai Fungsi Kebudayaan. Dalam Bagong Suyanto, 1995, Perangkap Kemiskinan. Problema dan Strategi Pengentasannya. Airlangga University Press. Surabaya.